



P E M E R I N T A H
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIANPROVINSI NTB

DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas petunjuk dan ridloNya penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024 dapat terselesaikan. Dokumen renja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan. Renja-SKPD Dinas Perindustrian ini memuat evaluasi kegiatan tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024, tujuan, sasaran, Program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dan program dan kegiatan beserta indikasi pagu masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Renja-SKPD Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024 ini dilandasi dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026, tentunya memperhatikan kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional, termasuk antisipasi adanya issue strategis dan gejolak sosial sewaktu-waktu yang akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Semoga dokumen ini dapat menyajikan perencanaan Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2024, dan sebagai acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan industri sektor industri yang lebih baik..

Mataram, 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nuryanti, SE.,ME
NIP. 19760104 199902 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor industri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, dimana dengan adanya industri maka perekonomian dapat bergerak dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan industri tersebut, pada tahun anggaran 2024 Dinas Perindustrian menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian tahun 2024 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024 – 2026.

Dokumen rencana kerja tahun 2024 Dinas Perindustrian ini, mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dalam RPD provinsi NTB tahun 2024 - 2026.

Penyusunan Renja mengacu pada kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan. Disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perudahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB Tahun 2021 – 2041.
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yaitu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyelenggaraan Program dan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2024 adalah:

- a. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Tahun 2024;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2024.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja
- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun lalu dan pencapaian kinerja terhadap target yang telah tertuang dalam rencana strategis Dinas Perindustrian tahun 2019 - 2023. hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan evaluasi merupakan fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui kegiatan-kegiatan yang terlaksana. Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2022 secara makro bercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 dan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023, serta secara mikro adalah hasil kerja dari Renja tersebut. Dinas Perindustrian Provinsi NTB telah berupaya secara optimal menjalankan program-program pemerintah, namun tentunya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terkait pencapaian target dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian

Ukuran keberhasilan perencanaan dan kegiatan tentunya dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan selanjutnya. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan

Evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang sehingga kesalahan ditahun sebelumnya menjadi bahan pembelajaran dalam meminimalisir kesalahan ditahun berikutnya. Adapun capaian kinerja Dinas perindustrian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja RPJMD Dinas Perindustrian 2022

No	Kinerja Renstra	Target	Capaian
1	Pertambahan nilai PDRB sektor industri (Milyar)	173,02	87,90*
2	Pertumbuhan industri (%)	7,50	7,55*

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

3	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah (%)	3,14	3,33
---	--	------	------

Pada tabel diatas terlihat capaian pertambahan nilai PDRB sektor industri pada tahun 2022 sebesar 87,90 milyar, pertumbuhan industri mencapai 7,55 persen dengan target yang dimiliki adalah 7,50 persen, dan persentase inudtri yang meningkat menjadi industri menengah sebesar 3,33 persen .

Tabel. 2.2. Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Industri	Persentase SDM Industri yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp 1.022.881.000	Rp 959.137.350	93,77%		Rp 63.743.650	
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi				Rp 1.022.881.000	Rp 959.137.350	93,77%		Rp 63.743.650	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				Rp 1.022.881.000	Rp 959.137.350	93,77%		Rp 63.743.650	
			Bimtek Pemasaran Hasil Olahan Tembakau ----> Bimtek Pemanfaatan Hasil Olahan Diversifikasi Tembakau untuk Industri Kriya	20 IKM	20 IKM	100%	Rp 162.929.000	Rp 161.932.375	99,39%		Rp 996.625	
			Bimtek Pembuatan Ekstrak dan Bumbu Rokok	20 IKM	20 IKM	100%	Rp 217.925.000	Rp 199.697.000	91,64%		Rp 18.228.000	
			Bimtek Pengolahan Asap Cair Tembakau -> Bimtek Pengolahan Diversifikasi Tanaman Tembakau	20 IKM	20 IKM	100%	Rp 222.786.000	Rp 218.161.000	97,92%		Rp 4.625.000	
			Bimtek Pengolahan Konsentrat Tembakau --> Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani Tembakau dan lainnya	20 IKM	20 IKM	100%	Rp 220.551.000	Rp 193.728.000	87,84%		Rp 26.823.000	
			Bimtek Pengolahan Tembakau	20 IKM	20 IKM	100%	Rp 178.690.000	Rp 165.618.975	92,69%		Rp 13.071.025	
			Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)	20 IKM	20 IKM	100%	-	-				
			Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Uji Kompetensi SDM Mekanik Mesin CNC	20 IKM	20 IKM	100%	-	-				
			Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Uji Kompetensi SDM Pertembakauan dan lainnya	20 IKM	20 IKM	100%	-	-				
			Perjalanan Dinas Seksi Pengembangan SDM	100%	100%	100%	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00%		Rp -	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
Bimbingan Teknis Cinematografi												
2	Meningkatnya Kapasitas Produk Industri	Nilai Investasi Pelaku Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp 6.657.819.733	Rp 6.028.487.593	90,55%		Rp 629.332.140	
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi				Rp 6.657.819.733	Rp 6.028.487.593	90,55%		Rp 629.332.140	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				Rp 700.000.000	Rp 599.907.700	85,70%		Rp 100.092.300	
			Pembangunan Gudang Tembakau	1 keg	1 keg	100%	Rp 700.000.000	Rp 599.907.700	85,70%		Rp 100.092.300	
			Pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) Bagi IKM Pangan	20 IKM	20 IKM	100%	-	-				

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	80 IKM	80 IKM	100%	Rp 553.614.100	Rp 492.074.497	88,88%	Rp 61.539.603
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	140 IKM	140 IKM		Rp 5.404.205.633	Rp 4.936.505.396	91,35%	Rp 467.700.237
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Rp 315.433.500	Rp 248.745.400	78,86%	Rp 66.688.100
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				Rp 315.433.500	Rp 248.745.400	78,86%	Rp 66.688.100
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 keg	1 keg	100%	Rp 315.433.500	Rp 248.745.400	78,86%	Rp 66.688.100
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp 1.247.905.600	Rp 1.144.372.611	91,70%	Rp 103.532.989
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguana Industri Provinsi				Rp 1.247.905.600	Rp 1.144.372.611	91,70%	Rp 103.532.989
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 keg	1 keg	100%	Rp 386.517.000	Rp 348.022.960	90,04%	Rp 38.494.040
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	40 IKM	40 IKM	100%	Rp 405.803.000	Rp 401.561.644	98,95%	Rp 4.241.356
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				Rp 425.675.600	Rp 394.788.007	92,74%	Rp 30.887.593
			Pertemuan Inisiasi/Semiloka Desa Penghasil Tembakau	20 IKM	20 IKM	100%	Rp 125.765.600	Rp 125.440.007	99,74%	Rp 325.593
			Kajian Desa Industri Tembakau di Desa Semoyang Lombok Tengah	20 IKM	20 IKM	100%	Rp 150.000.000	Rp 149.348.000	99,57%	Rp 652.000
			Studi Tiru / Banding Kawasan Tembakau	1 keg	1 keg	100%	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100,00%	Rp -
			Perjalanan Dinas Seksi Pemanfaatan SDA	1 keg	1 keg	100%	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00%	Rp -
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				Rp 29.910.000	0	0,00%	Rp 29.910.000
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Rp 794.960.000	Rp 570.055.420	71,71%	Rp 224.904.580
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				Rp 794.960.000	Rp 570.055.420	71,71%	Rp 224.904.580
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	1 keg	1 keg	100%	Rp 794.960.000	Rp 570.055.420	71,71%	Rp 224.904.580
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Rp 471.383.000	Rp 313.390.384	66,48%	Rp 157.992.616
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				Rp 471.383.000	Rp 313.390.384	66,48%	Rp 157.992.616
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 keg	1 keg	100%	Rp 308.733.000	Rp 194.704.840	63,07%	Rp 114.028.160
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 keg	1 keg	100%	Rp 120.000.000	Rp 118.685.544	98,90%	Rp 1.314.456

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 keg	-	0%	Rp 42.650.000	0	0,00%	Rp 42.650.000
--	--	--	---	-------	---	----	------------------	---	-------	------------------

Pada tahun 2022 Dinas perindustrian mendapatkan anggaran sebesar Rp. 23.505.595.735,- dan dialokasikan pada tiga program prioritas yaitu progra perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional dan satu program rutin. Dari anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp. 20.980.337.238,- atau realisasi keuangannya sebesar 89,33 persen.

Dalam penyerapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan tersebut disebabkan adanya beberapa hal yaitu, selain adanya penghematan/efisiensi anggaran, aliran kas yang diakhir tahun (triwulan tiga dan empat) yang menyebabkan waktu pengadaan terbatas.

Sasaran dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan tujuan dari rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun tujuan pembangunan dalam rencana strategis dinas Perindustrian adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Capaian kinerja renstra Dinas perindustrian Provinsi NTB tahun 2022.

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	7,50%	7,55 %
2	Meningkatnya Kapasitas SDM IKM	Persentase IKM industri yang memiliki sertifikat kompetensi	30%	61,40%
3	Meningkatnya Kapasitas Produk Industri	Nilai Investasi Pelaku Industri (Milyar)	173,02 Milyard	173,90 Milyar

Peningkatan jumlah IKM di provinsi NTB pada tahun 2022 terlihat pada tabel diatas dimana ditargetkan sebesar 7,50 persen dengan capaian mencapai 7,55 persen. Sedangkan peningkatan kapasitas SDM industri dengan indikatornya adalah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi selama tahun 2022 sebesar 61,40 persen. Sedangkan nilai investasi mencapai pada angka 173,90 milyar.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan nasional tentunya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG** “. Dalam mewujudkan hal itu tentunya menggunakan sumberdaya yang tersedia yang memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan guna kehidupan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui tujuh misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam 7 agenda prioritas nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjadi Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dan pelaksanaan Rencana strategis Dinas perindustrian Provinsi NTB tahun 2019 -2023 dimana industri di NTB baru membangun pondasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industrialisasi. Dimana industrialisasi ini diharapkan sebagai penggerak kegiatan ekonomi yang ada di NTB.

Dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB tahun 2024 - 2026 sektor industri masih menjadi sektor prioritas untuk itu kebijakan2-kebijakan terkait industri tentunya harus mendapat dukungan secara utuh sehingga apa yang tertuang dalam rencana pembangunan dapat tercapai. Kebijakan pembangunan industri ini sebagaimana tertuang dalam pilar ketiga dalam RPD provinsi NTB “Membangun masyarakat NTB yang sejahtera” dengan meningkatkan daya saing daerah untuk akselerasiinvestasi industri.

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Ketika berbicara pembangunan maupun pengembangan industri sudah tentu kelestarian alam harus diperhatikan mengingat hal tersebut merupakan suatu yang berdampak. Dampak yang muncul akibat adanya suatu kegiatan manusia tentunya harus mampu diminimalisir sehingga tidak ada konflik yang terjadi didalam kegiatan yang kita lakukan sebagai suatu program prioritas. Dalam pilar kedua RPD Provinsi NTB telah disebutkan pentingnya menjaga kelestarian alam yang asri, sebagai tindak lanjut guna meminimalisir kegiatan industri.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN

Dinas perindustrian dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024 - 2026 memiliki tujuan pembangunan “meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas” dengan indikator meningkatnya nilai PDRB sektor industri.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun Sasaran dari Tujuan yang dirumuskan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Pertambahan nilai PDRB sektor industri.
3. Persentase industri kecil ke menengah dan,
4. Pertumbuhan Industri.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2024-2026

Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Tahun 2024 – 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Sektor Industri	Meningkatnya daya saing kompetensi SDM IKM	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha industri	10	15	20

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

2.	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah sektor industri	Meningkatnya ekonomi sektor industri pengolahan	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	6,5	8	<10
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Makanan dan Minuman	5.51 - 6.61	5.51 - 6.74	5.51 - 6.86
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Pengolahan Tembakau	8.08 - 9.69	8.08 - 9.88	8.08 - 10.06
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	5.74 - 6.89	5.74 - 7.02	5.74 - 7.15
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	8.44 - 10.12	8.44 - 10.32	8.44 - 10.51
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3.49 - 4.41	3.68 - 4.51	3.8 - 4.61
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3.78 - 4.54	3.78 - 4.62	3.78 - 4.71

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.3 - 3.96	3.3 - 4.03	3.3 - 4.11
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Barang Galian bukan Logam	2.48 - 2.98	2.48 - 3.04	2.48 - 3.1
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Logam Dasar	4.47 - 5.37	4.5 - 5.5	4.52 - 5.64
			Persentase peningkatan nilai PDRB i sub sektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	4.04 - 5.14	4.32 - 5.29	4.59 - 5.44
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Alat Angkutan	7.57 - 9.1	7.59 - 9.29	7.61 - 9.49
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri Furnitur	7.79 - 9.35	7.79 - 9.53	7.79 - 9.7
			Persentase peningkatan nilai PDRB sub sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	6.19 - 7.45	6.22 - 7.62	6.25 - 7.8

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

			mesin dan peralatan			
3.	Terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Meningkatnya kontribusi PAD sektor industri	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	7-10	10-15	<15

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan yang telah tertuang dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mewujudkan tujuan sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 -2026, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Kerja tahun 2024 dengan beberapa program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang tertuang pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 untuk APBD.

Tabel 3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	URAIAN	2024	
			Target	Anggaran (Rp)
TOTAL				35,104,839,919
Terwujudnya transportasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah	Nilai Sakip OPD A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	12,502,642,594
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	166,549,865
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	44,359,770
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dok	26,013,750
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dok	25,431,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	1 Dok	16,149,745
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	1 Dok	18,001,000

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Tujuan	Sasaran	URAIAN	2024	
			Target	Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	19,761,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	16,833,600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,305,930,589
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	8,259,449,499
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	10,954,550
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	18,881,520
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dok	16,645,020
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dok	32,990,790
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	16,345,770
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	16,645,020
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,752,079,050
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 paket	39,673,200
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 paket	57,750,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 paket	372,898,350
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 tahun	150,391,500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5 Dok	137,046,000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	260 orang	126,420,000
		penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dok	867,900,000

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Tujuan	Sasaran	URAIAN	2024	
			Target	Anggaran (Rp)
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,678,367,800
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	38,958,800
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rek	240,723,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dok	1,398,686,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	566,724,500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorngan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 unit	263,256,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	70,053,500
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	233,415,000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN MEMBANGUN INDUSTRI	6 Dok	17,745,940,625
	Meningkatnya ekonomi sektor industri pengolahan	Penyusunan , Penerapan , dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Povinsi	6 Dok	17,745,940,625
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	6 Dok	546,165,000
		Fasilitasi Penyusunan RPIK Kabupaten/ Kota	10 Keg	75,700,000
		FGD Industrialisasi	2 Keg	150,115,000
		Penyelarasan Program kegiatan	2 Keg	120,115,000
		FGD Industrialisasi Go to Public	2 Keg	200,235,000
	Meningkatnya daya saing kompetensi SDM IKM	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dok	583,750,000

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Tujuan	Sasaran	URAIAN	2024	
			Target	Anggaran (Rp)
		Pelatihan Manajaerial IKM	2 Keg	109,150,000
		Bimtek Modul Perluasan Cangkupan Wilayah Industri	2 Keg	174,600,000
		Temu Bisnis/ Bisnis Maching Industri	1 keg	150,000,000
		Temu Mitra Investor dan Stakeholder	1 keg	150,000,000
		Jambore Industrialisasi	1 keg	100.000.000
		Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dok	5,670,000,000
		FGD Desa Industri	2 Keg	150,000,000
		Pengembangan Kawasan Desa Industri	1 Keg	1,000,000,000
		Pelatihan keterampilan kerja SDM IKM	3 Keg	250,000,000
		Bimbingan teknis pengolahan sumber daya alam (SDA) industri	2 Keg	200,000,000
		Bimbingan Teknis Industri Makanan dan Minuman	4 Keg	400,000,000
		Bimtek Pengolahan industri turunan Tembakau	4 Keg	400,000,000
		sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4 Keg	400,000,000
		BIMTEK Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	4 Keg	500,000,000
		Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4 Keg	400,000,000
		Bimbingan Teknis Industri Kimia, Kosmetik dan Industri Herbal	4 Keg	350,000,000
		Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4 Keg	350,000,000
		Industri Barang Galian bukan Logam	4 Keg	250,000,000
		Industri Logam Dasar	2 Keg	130,000,000

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Tujuan	Sasaran	URAIAN	2024	
			Target	Anggaran (Rp)
		Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	2 Keg	130,000,000
		Industri Alat Angkutan	4 Keg	250,000,000
		Industri Furnitur	2 Keg	130,000,000
		Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	4 Keg	250,000,000
		Bimbingan Teknis Industri turunan smelter	2 Keg	130,000,000
	Meningkatnya ekonomi sektor industri pengolahan	Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dok	2,001,347,000
		Fasilitasi Startup Industri Baru	4 Keg	600,347,000
		Pendampingan Wirausahawan Milenial	4 Keg	351,000,000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi IKM	4 Keg	450,000,000
		Pengembangan Aplikasi I Doors	1 keg	300,000,000
		Pengembangan Aplikasi KOIN (Komunitas Industri)	1 keg	300,000,000
		Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dok	8,944,678,625
		Fasilitasi Sarana dan Parasarana IKM Starup	1 Paket	3,723,403,587
		belanja yang diserahkan kemasayarakat	100 jenis	5,021,275,038
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	200,000,000
	Peningkatan Produktivitas Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	70%	3,756,506,700

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Tujuan	Sasaran	URAIAN	2024	
			Target	Anggaran (Rp)
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	150 IKM	3,756,506,700
		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 Dok	920,000,000
		Fasilitasi Standarisasi Produk IKM (SNI)	5 produk	190,000,000
		Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk IKM	100 Produk	175,000,000
		Fasilitasi Uji F0	10 Produk	180,000,000
		Fasilitasi HaKI dan Merk Produk IKM	100 Produk	200,000,000
		Bimtek Industri Hijau dan Energi Terbarukan	2 keg	175,000,000
	Meningkatnya kontribusi PAD sektor industri	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	50 Dok	2,836,506,700
		Pembangunan Kawasan NTB HIP	5 Keg	800,036,000
		Pengawasan dan Pengendalian Produk IKM	10 keg	125,098,500
		Peningkatan Peran Promosi, Marketing dan Diseminasi	5 Keg	550,500,000
		Bulog Industri Berbasis Desa untuk ketersediaan Bahan Baku Industri	2 keg	175,000,000
		Bimtek Kemasan Bagi IKM	3 Keg	385,673,500
		Peningkatan Mutu Kemasan Produk IKM	3 Keg	300,198,700
		Pengembangan 99 Desa Industri	5 keg	500,000,000

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

Tujuan	Sasaran	URAIAN	2024	
			Target	Anggaran (Rp)
Meningkatnya daya saing kompetensi SDM IKM		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1,02%	1,099,750,000
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	1,099,750,000
		Fasilitas Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dok	367,250,000
		Diklat Kolektif pendamping komunitas industry naik kelas	3 Keg	177,250,000
		Pendataan SDM dan Kapasitas Industri	1 Keg	90,000,000
		Pengembangan Aplikasi Si- Manis	1 Keg	100,000,000
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dok	532,500,000
		Peningkatan Kapasitas Manajerial SDM Industri	3 Keg	182,500,000
		Pelatihan 18 Modul Indoor bagi SDM IKM	2 keg	250,000,000
		Festival Diseminasi produk hasil industrialisasi NTB	2 Keg	100,000,000
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dok	200,000,000
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	20 Keg	200,000,000

RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 2023

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD sebagai turunan dari RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan sasaran instansi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026 dan dijabarkan Kembali pada Renstra Dinas Perindustrian provinsi NTB 2024 - 2026.